

Makro Ekonomi – Perkembangan Inflasi

Perkembangan Inflasi per Sektor (M/o/M)

Tahun	Umum	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011	4,44	2,95	6,71	5,30	6,60	4,67	3,98	3,34
2012	7,06	8,44	7,91	6,78	3,24	5,46	3,96	8,68
2013	3,17	6,71	6,02	1,29	4,22	4,32	3,72	-1,46
2014	0,00	0,79	0,71	0,34	0,24	0,22	0,07	0,31
Jan	-0,24	0,60	0,65	0,80	0,85	0,66	0,26	-4,04
Feb	-0,36	-1,47	0,45	0,41	0,52	0,39	0,14	-1,53
Mar	0,17	-0,73	0,61	0,29	-0,08	0,64	0,10	0,77
Apr	0,36	-0,79	0,50	0,22	0,24	0,38	0,05	1,80
Mei	0,50	1,39	0,50	0,20	0,23	0,34	0,06	0,20
2015	0,54	1,60	0,55	0,23	0,28	0,32	0,07	0,11
Jul	0,93	2,02	0,51	0,13	0,39	0,36	0,34	1,74
Ags	0,39	0,91	0,71	0,16	0,01	0,70	1,72	-0,58
Sep	-0,05	-1,07	0,39	0,20	0,83	0,44	0,89	-0,40
Okt	-0,08	-1,06	0,40	0,09	0,25	0,29	0,16	0,02
Nov	0,21	0,33	0,47	0,15	-0,23	0,44	0,05	0,06
Des	0,96	3,20	0,50	0,40	0,09	0,24	0,06	0,45
2016	0,51	2,20	0,51	0,53	0,26	0,36	0,15	-1,11
Jan	-0,09	-0,58	0,63	-0,45	0,64	0,26	0,06	-0,15
Mar	0,19	0,69	0,36	-0,07	0,55	0,30	0,03	-0,22
Apr	-0,45	-0,94	0,35	-0,13	0,22	0,31	0,03	-1,60
Mei	0,24	0,30	0,58	0,02	0,44	0,27	0,03	0,21
2016	0,66	1,62	0,58	0,15	0,70	0,34	0,03	0,63
Jul	0,69	1,12	0,54	0,24	0,44	0,37	0,51	1,22
Aug	-0,02	-0,68	0,41	0,41	0,40	0,39	1,18	-1,02
Sep	0,22	-0,07	0,34	0,29	0,13	0,33	0,52	0,19
Oct	0,14	-0,21	0,24	0,56	-0,31	0,29	0,10	-0,03
Nov	0,47	1,66	0,25	0,16	-0,01	0,30	0,02	0,07
Dec	0,42	0,50	0,45	0,18	-0,46	0,32	0,05	1,12

Perkembangan Inflasi per Sektor (Y/o/Y)

Tahun	Umum	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011	3,79	3,64	4,51	3,47	7,57	4,26	5,16	1,92
2012	4,30	5,68	6,11	3,35	4,67	2,91	4,21	2,20
2013	8,38	11,35	7,45	6,22	0,52	3,70	3,91	15,36
2014	7,32	7,34	7,60	5,86	3,11	4,03	3,85	13,20
2015	6,70	6,89	7,40	5,42	4,50	4,77	3,96	10,15
2016	4,53	4,59	6,53	5,57	2,32	4,74	4,21	2,39
2017	8,36	10,57	8,11	7,36	3,08	5,71	4,44	12,14
2018	6,96	8,24	8,04	7,14	3,38	5,64	4,42	7,40
2019	6,29	6,28	8,06	7,40	3,33	5,76	4,38	5,59
2020	6,38	5,96	8,25	7,55	3,17	6,00	4,34	6,16
2021	6,79	6,29	8,30	7,52	3,67	5,76	4,15	7,85
2022	7,15	7,92	8,47	7,49	3,78	5,68	4,15	7,84
2023	7,26	8,58	8,71	7,33	3,76	5,63	4,13	7,75
2024	7,26	8,66	8,19	6,99	3,29	5,60	4,02	8,67
2025	7,18	9,26	8,39	6,38	3,06	5,99	4,17	8,17
2026	6,83	8,26	8,26	5,78	4,10	6,15	4,39	8,00
2027	6,25	6,85	8,23	4,78	4,15	5,82	4,31	7,84
2028	4,89	4,96	7,97	4,42	4,00	5,84	4,28	3,47
2029	3,35	4,93	6,42	3,34	3,43	5,32	3,97	-1,53
2030	4,14	6,60	6,27	3,06	2,83	5,00	3,85	1,47
2031	4,42	7,55	6,46	2,17	2,96	4,87	3,77	2,89
2032	4,45	9,09	6,20	1,81	3,61	4,51	3,70	1,88
2033	3,60	8,92	6,04	1,45	3,59	4,44	3,67	-1,52
2034	3,33	7,75	6,13	1,26	3,80	4,37	3,63	-1,50
2035	3,45	7,77	6,16	1,18	4,24	4,39	3,59	-0,99
2036	3,21	6,81	6,19	1,29	4,30	4,40	3,77	-1,49
2037	2,79	5,14	5,88	1,55	4,71	4,09	3,21	-1,93
2038	3,07	6,20	5,83	1,64	3,98	3,97	2,83	-1,35
2039	3,31	7,11	5,66	2,11	3,40	3,98	2,77	-1,40
2040	3,58	8,53	5,43	2,12	3,63	3,83	2,74	-1,38
2041	3,02	5,69	5,38	1,90	3,05	3,92	2,73	-0,72

Catatan : 2011-2013 tahun dasar 2007=100  
2014-2016 tahun dasar 2012=100

Keterangan : (1) Bahan Makanan; (2) Makanan Olahan, Minuman, Tembakau; (3) Perumahan, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; (4) Sandang; (5) Kesehatan; (6) Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga; (7) Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.  
Sumber : BPS, CEIC, Januari 2017.

Disclaimer :

Laporan ini disajikan oleh ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) hanya untuk tujuan informasi resmi internal. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh Tim Analisis APINDO meskipun demikian APINDO tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. APINDO maupun officer dan / atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang timbul baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini oleh pihak manapun.

ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA

Gedung Permata Kuningan Lt. 10 | Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Guntur–Setiabudi Jakarta 12980 | Tlp (62)21 8378 0824 Fax (62)21 8378 0823 | www.apindo.or.id

ESDM

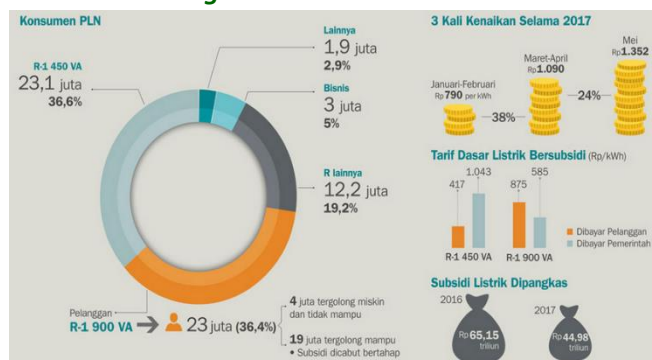
Skema Baru Kontrak Migas



Sumber : Kementerian ESDM, 2017.

Investasi hulu migas memasuki babak baru dengan terbitnya Permen ESDM No. 8/2017 mengenai kontrak bagi hasil gross split. Melalui skema baru ini, modal serta resiko sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor, dan tak ada pergantian biaya oleh negara seperti dalam skema production sharing contract (PSC).

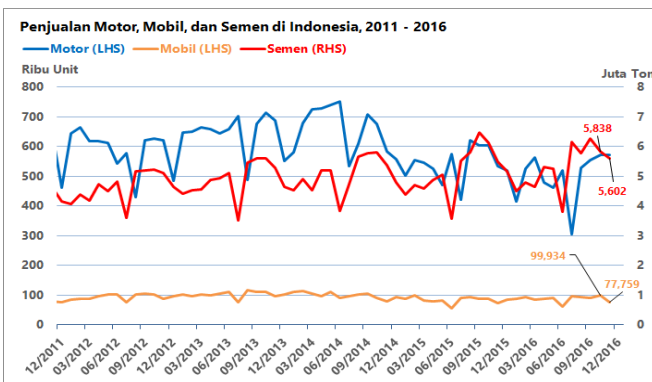
Pemerintah Pangkas Subsidi Listrik



Sumber : PLN, ESDM, 2017.

Mulai 1 Januari 2017, pemerintah mencabut subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga 900 VA yang tergolong mampu, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM 29/2016. Subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang dianggap miskin.

Indikator Penjualan



Sumber : ASTRA International, GAIKINDO, Asosiasi Semen Indonesia, CEIC, 2017.

Sosial – Ekonomi

**Ketimpangan Ekonomi Indonesia Peringkat ke-4**



**INDEKS KETIMPANGAN MASIH JAUH DARI TARGET**  
 Jurang antara si kaya dan miskin di Indonesia masih tinggi. Dari target 0,36. Gini Ratio Indeks masih di angka 0,397 pada Maret 2016.



**PERBANKAN NASIONAL DIKUASAI PEMILIK REKENING DI ATAS 2 MILIAR**



Sumber : BI, BPS, Credit Suisse, 2016.

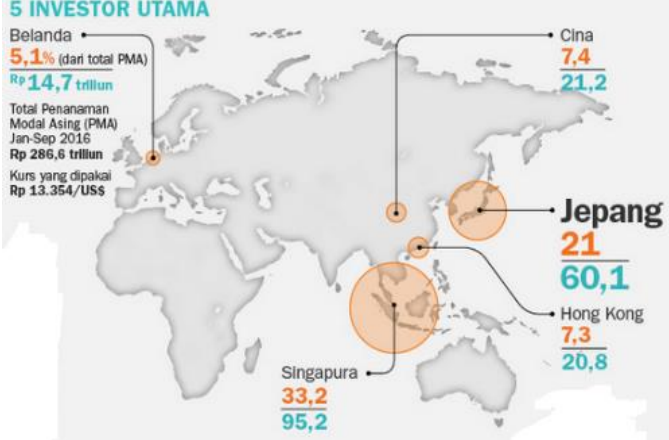
Ketimpangan orang kaya dan miskin di Tanah Air masih tinggi. Ini tercermin dari akumulasi kekayaan segelintir warga yang menguasai kekayaan nasional dan simpanan perbankan. Bahkan Lembaga Keuangan Swiss, Cresit Suisse, menempatkan Indonesia di urutan ke-4 dengan disparitas kekayaan tertinggi.

**Disclaimer :**

Laporan ini disajikan oleh ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) hanya untuk tujuan informasi resmi internal. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh Tim Analisis APINDO meskipun demikian APINDO tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. APINDO maupun of@cer dan / atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang timbul baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini oleh pihak manapun.

Investasi

**Jepang Investor Ke-2 Terbesar**



**INVESTASI JEPANG 2011-2016**



**INVESTASI DI SEJUMLAH PROYEK**

- Investasi Toyota Motor (Rp 20 triliun)
- Pembangunan MRT Jakarta (Rp 9 triliun)
- Kerja sama perdagangan karbon (Rp 2 triliun)
- Sektor kelistrikan (Rp 160 triliun)
- PLTU Batang (Rp 45 triliun)

Sumber : BKPM, Kemenkeu, Setkab, 2017.

Dalam lawatannya ke Indonesia pada 15-16 Januari 2017, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe membahas berbagai hal termasuk sejumlah proyek kerja sama kedua negara. Abe dan Presiden Jokowi sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, maritim, dan sosial budaya.

Selama ini Jepang adalah salah satu mitra perdagangan dan investasi utama Indonesia. Realisasi investasi Jepang pada Januari hingga September 2016 mencapai US\$ 4,5 milyar atau sekitar Rp 60 trilyun. Jumlah tersebut menempatkan Jepang sebagai investor asing terbesar kedua di Indonesia di bawah Singapura.

Belakangan, sejumlah proyek kerjasama ditawarkan Indonesia ke Jepang. Dalam pertemuan Abe-Jokowi, sejumlah proyek yang dibahas antara lain pelabuhan Patimban, pengembangan Blok Masela, pembangunan kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya, hingga rencana pengembangan sentra perikanan terpadu di pulau terluar.